

## STRATEGI HUMAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOYOLALI DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

### DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATION PUBLIC RELATIONS STRATEGY OF BOYOLALI DISTRICT IN PUBLIC INFORMATION MANAGEMENT

Oleh: Finnas Fauzia Trisani, 14419144018, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta  
[Finnasfauzia@gmail.com](mailto:Finnasfauzia@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang strategi humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan; 1) strategi humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dalam mengelola informasi publik; 2) alur pengelolaan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali. Informan penelitian adalah kepala bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas, Kasi Kehumasan dan Layanan Informasi Publik dan Kasi Pengelolaan Informasi Publik. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi. Selanjutnya validasi data dilakukan dengan *cross check* data wawancara dengan data observasi. Analisis data dilakukan melalui tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali menggunakan tiga pendekatan strategi humas dalam pengelolaan informasi publik yaitu, pendekatan operasional, pendekatan persuasif dan edukatif serta pendekatan kerjasama. 2) Alur pengelolaan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Pengumpulan informasi, Pengklasifikasian informasi, Pendokumentasian Informasi serta Pendistribusian informasi

**Kata Kunci:** Strategi Humas, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pengelolaan Informasi Publik

#### Abstract

*This study aims to describe about; 1) public relations strategy of Communication and Information Department (Diskominfo Boyolali) in managing public information; 2) The flow of public information management at Communication and Information Department Boyolali. This study used qualitative research. This research was conducted at Communication and Information Department Boyolali. Research informants were the head of Public Information and Communication Department, Head of Public Relations and Public Information Services and Head of Public Information Management. Data collected by interview and observation methods. Furthermore, data validation was done by crossing the interview data checked with observational data. Data analysis was done through data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show: 1) Communication and Information Department Boyolali used three strategics about managing public information, namely, accessing information strategy, accessing persuasive and educative strategy and collaborative approaches strategy. 2) Flow of public information management at Communication and Information Department Boyolali was carried out in accordance with the implementation of direct communication by the Ministry of Communication and Information, namely Collection of information, Classification of information, Documentation of information and Distribution of information.*

**Keywords:** Public Relations Strategy, Department of Communication and Information Technology, Management of Public Information

## PENDAHULUAN

Keberadaan komunikasi dan informasi pada situasi dan era apapun merupakan suatu kebutuhan dasar individu maupun komunitas sesuai dengan ketersediaan sarana komunikasi (Hasan R, 2008: 23). Pada era keterbukaan informasi semua pihak menuntut tingginya kualitas informasi, baik informasi yang masuk maupun keluar di setiap organisasi dan instansi. Dinamika komunikasi yang berkembang saat ini mengarahkan pemerintah lebih proaktif dan kreatif dalam pengemasan komunikasi. Hal ini senada dengan tuntutan masyarakat mengenai transparansi serta akuntabilitas publik. Sehingga untuk mengelola informasi tersebut, instansi pemerintah membentuk sebuah divisi Hubungan Masyarakat (Humas). Keberadaan Humas ini memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan jalannya suatu instansi. Humas berperan sebagai perantara dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi antara sebuah instansi dengan publik. Namun, hasil penelitian Suranto Aw (2014:25) mengindikasikan bahwa belum semua Humas menjalankan perannya secara maksimal.

Dapat diketahui bahwa Humas merupakan rangkuman kegiatan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara satu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang dilandaskan rasa saling pengertian (Jefkins F, 2003: 10). Artinya Humas selalu melakukan segala sesuatu dengan terencana. Kegiatan Humas tersebut dilakukan agar sebuah instansi memperoleh dukungan dari khalayaknya dan dapat menjalankan peran serta fungsinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada hakikatnya, Humas merupakan sebuah proses komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk menjalin hubungan yang baik agar tercipta citra serta tercapai tujuannya. Jika sebuah instansi memiliki citra yang positif maka akan muncul opini yang baik dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas Humas yaitu sebagai sarana penyampai informasi-informasi penting dari instansi, baik itu suatu kebijakan atau informasi lain yang harus disampaikan kepada masyarakat. Baiknya suatu hubungan antara pemerintah kepada masyarakat dapat dilihat dari baiknya informasi yang dapat diterima masyarakat.

Sejak 1 Mei 2010, telah diterbitkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Informasi Publik. Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut berdasar pada amanah UUD 1945 Pasal 28 huruf f yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi Publik pada hakekatnya adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik sendiri diartikan dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,

Semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi semakin tinggi. Penerapan UU KIP ini memiliki konsekuensi bahwa setiap Badan Publik harus memberikan informasi kepada publik (masyarakat). UU KIP mengatur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik/masyarakat, mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Disamping itu tentu adapula informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17 UU KIP. Oleh karena itu, menurut Helmi Malik selaku Sekretaris Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) dalam *setkab.go.id* atau *website* Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, saat membuka forum tematik Bakohumas dengan tema Bicara "Pendidikan Vokasi di Era Komunikasi" pada tahun

2015 mengatakan bahwa perlu adanya sinergi antar aparat bidang komunikasi informasi dan kehumasan untuk melakukan transformasi, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia dalam menerapkan nilai-nilai *good governance* dalam tata kelola organisasi. Karena diseminasi informasi yang dilakukan sendiri-sendiri tidak akan memberikan dampak yang besar. Berbeda halnya jika dilakukan secara bersama-sama dari pusat hingga daerah, informasi tersebut akan lebih cepat sampai kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik, dimana diseminasi diarahkan harus secara cepat, tepat, efektif, berwawasan nasional, dan lintas daerah.

Sebagai garda terdepan dalam Pemerintah Kabupaten penyampaian informasi kepada publik, Humas memiliki peranan yang cukup penting dalam pengimplementasian undang-undang tersebut. Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menjamin tersedianya informasi yang terbuka untuk publik dan dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, Humas dituntut bisa bekerja profesional. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik melalui dokumentasi internal maupun penyampaian ke publik melalui media. Hal ini menuntut manajemen komunikasi yang efektif dan efisien.

Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo) di Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas Humas diatas. Menurut Broto (2014: 2-3) dari berbagai aspek dan sumber daya sesungguhnya Departemen Kominfo sudah dapat mengoptimalkan kinerjanya. Dari segi kelembagaan juga tidak memiliki kekurangan, karena keberadaan departemen ini sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005. Menurut Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa Departemen Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Broto juga menambahkan bahwa pada awalnya keberadaan Departemen ini diragukan banyak kalangan, premis para pengkritik adalah Departemen Kominfo dikhawatirkan masih akan tetap

melanjutkan strategi kebijakan yang represif. Menurut Broto (2014: 8) Departemen Kominfo pada awalnya akan terjebak pada masalah birokrasi yang masih menggejala di hampir seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Ada anggapan bahwa suatu informasi yang sudah disampaikan berarti akan langsung dikutip media massa. Hal tersebut adalah anggapan yang keliru, karena di era keterbukaan informasi media massa cenderung sudah memiliki pilihan pasarnya sendiri. Boyolali merupakan suatu lembaga pemerintahan yang menangani otonomi daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) khususnya Bidang Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali bertugas memberikan informasi kepada publik tentang kebijakan yang akan dan telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dan menjalin hubungan yang baik dengan publiknya. Salah satu langkah yang diambil Humas Pemkab dalam rangka menyebarkan informasi kepada publik adalah menggunakan media massa. Peranan media massa pada saat ini sangat kuat dalam menyebarkan informasi ke masyarakat. Banyak instansi/perusahaan yang memanfaatkan media massa sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan dan informasi. Peranan Humas Pemkab Boyolali sangat diperlukan untuk mengatasi masalah jika terjadi suatu konflik, melalui pengelolaan informasi yang baik Humas berusaha meminimalisir opini negatif di masyarakat serta berusaha menciptakan rasa keterbukaan antara masyarakat dengan Humas.

Sebagai kota kecil dengan luas 1.015 km<sup>2</sup> yang berada di tengah-tengah kota besar, pemerintah kota Boyolali sedang gencar-gencarnya berbenah diri mulai dari infrastruktur, wisata, pendidikan, tata kota dan banyak aspek lainnya. Seperti apa yang dilansir oleh [ppid.bojolali.go.id](http://ppid.bojolali.go.id) (2019) bahwa Kabupaten Boyolali telah mendapatkan piala ke-13 dalam penghargaan adipura. Setelah itu Boyolali juga sedang banyak membangun dan mengembangkan wisata-wisata baru yang kelak akan menjad sumber pendapatan kota dan warganya. Sesuai dengan yang dilansir oleh [krjogja.com](http://krjogja.com) (2017) Pemkab Boyolali memperoleh penghargaan sebagai salah satu dari lima daerah se-Indonesia yang mempunyai kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni Nominasi Prestasi Kinerja Tertinggi pada tahun 2017. Prestasi ini cukup sulit dicapai, sebab Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja kepada sebanyak 540 daerah

otonom di Indonesia baik tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Tabel 1. Nominasi 5 kota dan kabupaten dengan prestasi kinerja tertinggi

Kabupaten		Kota	
1.	Balukumbu	1.	Ambon
2.	Malang	2.	Semarang
3.	Boyolali	3.	Surakarta
4.	Sindenreng Rappang	4.	Pare-pare
5.	Kulon Progo	5.	Kediri

Sumber: *krjogja.com* 2017

Selain itu Kabupaten Boyolali juga mendapat penghargaan tentang Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dalam ajang Indonesia Award. Penghargaan ini diperoleh dalam rangkaian Metamorfosa iNews di Jakarta Concert Hall iNews Center Jakarta, 31 Oktober 2017. Tidak dapat dipungkiri dalam roda pemerintahan pasti ditemukan adanya isu baik dan isu buruk. Banyaknya prestasi yang didapatkan Boyolali tidak serta merta mengidektifikasikan tidak ada konflik maupun isu yang buruk tentang Boyolali. Konflik dan isu buruk tersebut dapat terjadi dan muncul oleh faktor dari dalam maupun dari luar. Seperti yang terjadi di tahun 2017, Bupati Boyolali memberika pernyataan tentang akan dibangunnya sebuah *theme park* Disneyland di kota Boyolali, namun tak lama setelah itu pihak Disneyland Asia Tenggara membantah akan pernyataan tersebut, hal tersebut sontak memberi kekecewaan bukan hanya warga Boyolali itu sendiri namun juga warga Negara Indonesia. (CNN Indonesia, 2017)

CNN Indonesia (2017) juga melansir bahwa hal tersebut sempat menjadi bahan pembicaraan dan keriuhan di *Twitter*, seketika rasa suka cita itu hilang ketika tahu Disneyland di Boyolali hanya isapan jempol atau *hoax*. Kasus tersebut sangat berdampak buruk pada citra Bupati dan Kabuapten. Untuk mencegah tersebarnya berita *hoax* tersebut maka Humas Kabupaten Boyolali menindaklanjutinya dengan mengadakan konfrensi pers juga menerbitkan release kepada media-media cetak maupun elektronik. Seperti yang dilansir *IDN Times* (2017) dikutip dari Liputan 6, ia menceritakan bahwa wahana bermain yang direncanakan akan dibangun di Boyolali memang bukan memakai merek dagang Walt Disney. Namun, konsepnya

akan dibuat seperti, bahkan melebihi, Disneyland yang ada saat ini. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi tersebut tidaklah cukup, masih banyak ditemui media dan masyarakat Boyolali mapupun luar Boyolali yang masih meragukan kredibilitas Bupati juga Humas Boyolali karena dinilai lalai dalam menyampaikan informasi. Maka diperlukan manajemen serta strategi-strategi yang sudah terencana untuk membangun sebuah kepercayaan dan opini positif di dalam masyarakat. Demi mewujudkan kekompakan diantara pemerintah dan masyarakat dibutuhkan usaha-usaha yang sudah terencana oleh Humas, khususnya dengan mengelola informasi publik dengan baik, karena lembaga pemerintahan saat ini mendapatkan tuntutan-tuntutan dari masyarakat luas agar memberi perubahan yang lebih baik. Sehubungan dengan hal di atas, maka informasi harus dikelola dengan baik, terpola dan terstruktur, sehingga terbentuklah dokumentasi informasi yang teratur yang memudahkan pengelola dalam melayani publik yang membutuhkan informasi.

Semenjak dipisahkannya Humas pada struktur sekretariat kabupaten Boyolali, maka pada tahun 2016 terbentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali sesuai dengan Peraturan Bupati No 66 tahun 2016 tentang Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas yang tergolong baru ini memiliki beberapa Divisi yang salah satunya bertugas dalam pengelolaan informasi publik. Pengelolaan informasi dan dokumentasi ini biasanya dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik, sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka diharapkan masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi dengan alur yang lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan public ini. Segala kegiatan pemerintahan dari segala penjuror instansi serta kebijakan-kebijakan yang ada akan dikelola dengan baik dan disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media salah satunya *website* resmi PPID Boyolali yang dapat diakses di [www.ppid.boyolali.go.id](http://www.ppid.boyolali.go.id).

Sesuai dengan uraian tugas bidang informasi publik Diskominfo Kabupaten Boyolali yang melaksanakan tugas Humas, Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah di Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penelitian tentang bagaimana strategi yang dilakukan Humas Diskominfo Pemkab Boyolali dalam mengelola informasi publik merupakan penelitian yang menarik.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015: 8) penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Menurut Ruslan (2010: 215) tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

Sedangkan Strauss dan Corbin (1997) yang dikutip oleh Brasowi dan Sukidin (2002: 1), menyatakan bahwa riset kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Bidang kehumasan adalah topik penelitian yang sangat sesuai menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Karena pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, peristiwa tertentu, pergerakan-pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan dalam kekeluargaan (Ruslan, 2010: 215).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah

melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, yang mana dalam penelitian ini melihat strategi Humas dalam menjalankan salah satu tugas dan fungsinya sebagai pengelola informasi publik.

Pendekatan kualitatif penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan *holistic* tentang strategi Humas Diskominfo Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan informasi publik.

### Setting Penelitian

Penelitian tentang “Strategi Humas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pengelolaan Informasi Publik” ini dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali di Jalan Kebo Kenongo no.1 Kemiri, Mojosoongo, Boyolali. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September.

### Sumber dan Jenis Data

Menurut Arikunto (2010: 144), sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Sutopo (2006: 56-57), bahwa sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Menurut Lofland dalam Moloeng (2012: 157) sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada penelitian kualitatif, kegiatan kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Sumber dan jenis data pada penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data yang peneliti dapatkan secara langsung dari lapangan adalah data primer. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer mengenai strategi humas Diskominfo Boyolali dalam mengelola informasi public melalui kata-kata dan tindakan dari sumber melalui wawancara dengan subjek penelitian. Sugiyono (2015: 216) mengemukakan bahwa sampel

dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Narasumber (Informan) dalam hal ini yaitu orang yang bisa memberikan informasi tentang data yang ingin dikumpulkan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015: 85) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini mempertimbangkan kredibilitas informan dalam bidangnya, keterlibatan informan dalam kegiatan-kegiatan Humas dalam mengelola informasi publik, dan otoritas informan dalam organisasi. Namun di tengah proses penelitian dari 5 informan yang direncanakannya hanya ada 3 narasumber yang bisa diwawancarai. Adapun narasumber atau informan sebagai sumber data yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Diskominfo Kabupaten Boyolali
- 2) Kasi Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Diskominfo Kabupaten Boyolali
- 3) Kasi Bidang Kehumasan dan Layanan Informasi Publik, Diskominfo Kabupaten Boyolali

Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada empat informan tersebut akan menjadi sumber data primer dari penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Selain itu data atau informasi dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui pengamatan atau observasi terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik. Kegiatan observasi yang dilaksanakan oleh peneliti memperoleh data yang sifatnya mendukung keperluan data primer. Data yang diperoleh dari hasil observasi sebagai sumber data sekunder.

### Instrumen Pengumpulan Data

Bogdan dan Biklen (2011: 62) menyatakan bahwa *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument*. Artinya, penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber langsung dari data dan peneliti itu adalah instrumen kunci. Dalam penelitian ini peneliti adalah alat pengumpul

data utama. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Menurut Sugiyono (2015: 222), Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

### Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

### Wawancara

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan mengenai strategi Humas Diskominfo Kabupaten Boyolali kepada informan. Wawancara tersebut dapat digunakan untuk menggali lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi. Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2015: 232) yang mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan, menurut Sugiyono (2015: 233) penelitian kualitatif memiliki tiga jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.

Menurut Moleong dalam Sugiyono (2015: 235) ada dua jenis pertanyaan yaitu pertanyaan luaran dan pertanyaan pendalaman. Pertanyaan luaran dalam penelitian ini adalah pertanyaan yang bersifat umum mengenai strategi Humas, sedangkan pertanyaan pendalaman pada penelitian ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengelolaan informasi publik. Sesuai pendapat Sugiyono (2015: 137), wawancara digunakan

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah sedikit/kecil.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan semi terstruktur kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun untuk mengumpulkan data yang dicari tentang Strategi Humas Diskominfo Boyolali dalam pengelolaan informasi publik.

### Observasi

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Metode observasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati aktivitas Humas Diskominfo Kabupaten Boyolali, serta kejadian atau peristiwa mengenai pengelolaan informasi publik. Kemudian hasil pengamatan tersebut dicatat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan, peneliti dapat melihat kejadian sebagaimana subyek yang diamati mengalaminya, menangkap, merasakan fenomena sesuai pengertian subyek dan obyek yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2015: 145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Menurut Arikunto (2010: 199) observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara teliti. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Peneliti menggunakan observasi nonpartisipan karena peneliti tidak terlibat secara langsung hanya sebagai pengamat independen.

Sugiyono (2015: 145) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi dapat dilakukan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden tidak terlalu besar. Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, proses kerja dan makna dari segala kegiatan humas Diskominfo Boyolali sehingga mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai strategi Humas Diskominfo

Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan informasi publik.

### Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data yang ada maka perlu dilakukan pemeriksaan data. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang akan digunakan adalah teknik *cross check* data. Menurut Burhan Bungin (2011: 91), teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan *cross check* data dilakukan manakala pengumpulan data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda, sesuai dengan penelitian kualitatif Strategi Humas Diskominfo Boyolali yang diajukan.

Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti Sugiyono (2015: 276). Maka dari itu dalam penelitian ini untuk memperoleh keabsahan data dilakukan *cross check* data hasil observasi dengan wawancara antar subjek penelitian Strategi Humas Diskominfo Boyolali.

### Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015: 244), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 246) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015: 246) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan.

Dalam model ini terdapat 4 komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004: 280-281), "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data". Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 247-253) adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi nonpartisipan dan wawancara kepada informan yang ada di Humas Diskominfo Kabupaten Boyolali.

2) Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian, yaitu Humas Diskominfo Kabupaten Boyolali.

Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau table yang telah didapatkan setelah melakukan pengumpulan data dan reduksi data mengenai strategi Humas Diskominfo Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan informasi publik.

3) Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal setelah penyajian data yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses publik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat. Strategi menurut Ruslan (2014: 133) adalah bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (*planning*), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen.

Hasan R (2005: 11) menjelaskan hakekat komunikasi pemerintahan adalah menjamin berjalannya fungsi pemerintahan melalui keterampilan berkomunikasi, terkait kepentingan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup sebaik-baiknya dengan tidak merugikan pihak manapun. Yang mana fungsi tersebut dilaksanakan oleh Humas. Humas pemerintahan memiliki tugas untuk menyebarkan informasi. Sesuai dengan pendapat ahli diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali merupakan suatu lembaga pemerintah yang mana menjalankan fungsi Humas, sehingga Dinas tersebut melaksanakan beberapa strategi Humas dalam pengelolaan informasi publik guna mewujudkan tujuan bersama.

### 1. Strategi Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dalam Pengelolaan Informasi Publik

Sebagai salah satu bagian penting dalam suatu perusahaan Humas berperan untuk membangun hubungan komunikasi antara organisasi dengan masyarakat Effendy (2013 : 4). Salah satu peran atau tugas Humas dalam proses membangun hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakatnya adalah dengan melaksanakan pengelolaan informasi publik.

Pengelolaan informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dilaksanakan sebagai salah satu strategi Humas. Menurut Arifin (1984: 59) strategi adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna

mencapai tujuan bersama. Melalui pengelolaan informasi publik Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dapat mencapai tujuan-tujuan Humas yang salah satu diantaranya menurut Ruslan (2014: 246), tujuan Humas adalah dapat menumbuhkembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal ataupun masyarakat dan konsumen. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengelolaan informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali, masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi positif atau prestasi-prestasi yang diraih oleh kabupaten sehingga dapat memunculkan opini masyarakat yang bersifat positif.

Lalu melalui pengelolaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dapat mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Pengertian antara publik dan pemerintah tercipta melalui media atau saluran-saluran yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali, yaitu media sosial (*instagram, twitter, facebook, whatsapp* dan *youtube*), website resmi juga laporan langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali.

Demi mewujudkan tujuan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali menggunakan 3 strategi dalam menjalankan Strategi Humas dalam pengelolaan informasi publik. Strategi Humas atau aspek-aspek pendekatan Humas menurut Ruslan (2014: 143-144) sangat penting dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya untuk menciptakan iklim yang kondusif antara perusahaan dengan publiknya demi tercapainya tujuan bersama. Dari 5 strategi humas menurut Ruslan (2014) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali mengambil 3 strategi yang sesuai dengan visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali, 1) Strategi Operasional, 2) Strategi Persuasif dan Edukatif serta 3) Strategi Kerjasama.

#### a) Strategi Operasional

Menurut Ruslan strategi operasional dapat dilakukan dengan menjalankan program kemasyarakatan, yang sesuai dengan opini, keluhan atau kehendak masyarakat. Artinya Humas harus mampu mendengar segala aspirasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Boyolali menggunakan strategi operasional untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali menyediakan berbagai saluran atau media interaksi antara masyarakat dengan pemerintah yaitu berupa media sosial (*instagram, twitter, facebook, whatsapp*, serta *youtube*) melalui kolom komentar, *direct message* juga kolom balasan pada media sosial masyarakat dalam mengemukakan aspirasinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali juga menyediakan *website*, sebagai saluran penyedia informasi juga aduan. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi dan aduan secara langsung dengan datang ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali.

#### b) Strategi Persuasif dan Edukatif

Ruslan berpendapat bahwa Humas berfungsi untuk menciptakan komunikasi dua arah (timbang balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan menggunakan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan kegiatan humas yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dalam proses edukasi terhadap masyarakat Boyolali. Proses edukasi dan persuasi tersebut dilaksanakan melalui media sosial dan *event-event* khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali atau kerjasama dengan instansi lain yang terkait.

#### c) Strategi Kerjasama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali menggunakan strategi kerjasama dalam upaya membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan berbagai kalangan baik internal maupun eksternal. Dalam kegiatannya Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak lain. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali melaksanakan kerjasama dengan 3 pihak yaitu sesama instansi pemerintah, pihak ketiga (eksternal) dan juga menjalin

kerjasama dengan media. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali mengadakan Forum Humas; koordinasi rutin dengan instansi-instansi pemerintah lain dengan frekuensi minimal 3 bulan sekali. Kelola media sosial dilakukan setiap hari demi menjaga keaktual dan faktualan berita dengan menggandeng wartawan. Dengan melaksanakan media relation, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dapat menjalin hubungan yang baik dengan wartawan.

Dari ketiga strategi tersebut peneliti dapat melihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali sudah cukup baik melaksanakan strategi Humas khususnya dalam pengelolaan informasi publik. Hal tersebut sesuai pendapat Rachmadi, (1994: 78) mengenai hal-hal harus dilakukan Humas yaitu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat pemerintah serta memberikan layanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur, dan obyektif menggunakan pendekatan operasional serta persuasif dan edukatif melalui media cetak, media sosial, televisi, radio dan media luar ruang. Kegiatan tersebut terus dilaksanakan dengan baik meskipun menemui beberapa hambatan seperti kurangnya SDM untuk membantu.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali memberi bantuan kepada media berita (*news media*) berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acara resmi yang penting. kegiatan tersebut didukung dengan adanya media relations yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak di dalam negeri, maupun khalayak di luar negeri melalui media-media yang tersedia. Serta mampu memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, Selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk *feedback* kepada pimpinan instansi-instansi pemerintahan yang bersangkutan sebagai input.

## 2. Alur Pengelolaan Informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali

Sebelum dapat menentukan alur yang tepat, dalam proses menjalankan strategi terdapat beberapa tahap yang harus dilalui demi mencapai tujuan bersama. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan Humas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali melalui beberapa tahapan sesuai dengan pendapat David (2011: 6), bahwa terdapat tiga tahap dalam melaksanakan strategi, yaitu tahap memformulasikan strategi, tahap mengimplementasikan strategi dan yang terakhir tahap mengevaluasi informasi.

Dalam tahap memformulasikan strategi dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali menetapkan visi dan misi dinas yang sesuai dengan visi misi kabupaten juga kementerian, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Boyolali mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi melalui *research* atau identifikasi masalah di lapangan secara langsung, lalu menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi yang sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Proses mengimplementasikan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali bertujuan untuk membentuk struktur organisasi guna menentukan pembagian kerja yang proporsional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali membagi tim menjadi 3 bidang; bidang Informasi Publik, bidang E-Gov serta bidang Statistik dan Persandian. Pada tahap ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali juga menyiapkan rancangan kegiatan tahunan dan *budgeting*. Namun dalam praktiknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali masih kurang maksimal dalam membentuk struktur organisasi dan pembagian kerja, karena masih banyak membutuhkan tenaga bantu dari luar atau dengan kata lain Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali kekurangan SDM.

Tahap terakhir dengan mengevaluasi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali melakukan proses penilaian melalui peninjauan ulang kegiatan-kegiatan humas dalam mengelola informasi publik. Humas merumuskan ulang pembaharuan pada strategi-strategi yang kurang sesuai dengan visi misi sebagai langkah korektif.

Dapat diketahui sebelumnya Romli (2005: 3) menyatakan bahwa informasi adalah keterangan, pesan, gagasan, atau pemberitahuan tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam definisi jurnalistik di atas, informasi yang dimaksud adalah (berita), *views* (pandangan atau opini), dan karangan khas yang disebut *feature* yang berisikan paduan fakta dan opini. Sedangkan pengertian informasi publik sesuai yang tercantum pada pasal 1 dan Bab I dari UU KIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara pada penelitian tentang Strategi Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali, peneliti melihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali sangat berpedoman peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika, juga keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 117 tahun 2010 tentang organisasi pengelola informasi dan dokumentasi yang semuanya telah tertuang pada buku pedoman yang telah diberikan oleh kementerian.

#### a) Pengumpulan Informasi

Proses pengumpulan informasi atau kegiatan pengumpulan informasi merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali lebih memperhatikan kuantitas informasi daripada jenis kepentingan informasi tersebut di dalam masyarakat. Dalam kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali masih kekurangan SDM, karena memfokuskan pada kuantitas maka masalah tersenut sangatlah penting.

Proses pengumpulan informasi publik tersebut kurang maksimal dikarenakan keterbatasan SDM yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali. Pengumpulan informasi publik yang bersifat berita dilaksanakan secara langsung terjun ke lapangan demi data yang lebih akurat.

Untuk data-data yang berkaitan dengan instansi lain di kumpulkan secara langsung oleh dinas terkait dan dikelola oleh PPID kabupaten Boyolali.

#### b) Pengklasifikasian Informasi

Dalam proses pengklasifikasian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali membagi informasi menjadi dua kelompok yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan. Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja. Sedangkan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18.

Namun informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan; Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaknya. Maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.

#### c) Pendokumentasian Informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali melakukan pendokumentasian informasi dengan kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh satuan kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi. Otentikasi informasi dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali memiliki prosedur tersendiri dalam permohonan masuk atau keluarnya informasi, hal tersebut dengan sendirinya akan memvalidasi setiap pemohon.

Informasi-informasi yang wajib disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali di akan *update* setiap hari sesuai dengan klasifikasi jenis informasi sesuai dengan undang-undang. Proses pengklasifikasian ini sangat lah penting, dengan adanya *website*

PPID Boyolali sangat memudahkan pengelola dan pembaca (masyarakat) dalam mencari informasi-informasi tersebut.

#### d) Pendistribusian Informasi

Pendistribusian informasi dilaksanakan secara langsung setelah informasi dinyatakan siap terbit. Pendistribusian ini dilakukan secara merata pada setiap media oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali sesuai dengan pasar ke seluruh wilayah. Media yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali beragam, yaitu media sosial, media cetak, media elektronik dan media luar ruang.

Proses pendistribusian informasi oleh Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali ini di sangat didukung dengan adanya strategi kerjasama yang digunakan. Dengan melibatkan banyak pihak proses pendistribusian informasi dapat dilakukan dengan efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian cet. XII*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bogdan, R. C, Biklen. 2011. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory dan Methods*. Boston: Allyin and Bacon, Inc.
- Brasowi, Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Prespektif Micro, Edisi Pertama*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Broto, Gatot. S. D. 2014. *The PR Tantangan Public Relation di Era Keterbukaan Informasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hasan, R. 2008. *The Information Society, Digital Media and Society Stories*. Molden: Polity Press.
- Jefkins, F. 2003. *Public Relations Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Moloeng, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, R. 2010. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 2014. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: DasarTeori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS.
- #### Jurnal
- Suranto (2011). *Komunikasi efektif untuk Menunjang Kinerja Perkantoran*. Kajian Ilmu administrasi Vol 5, 2
- #### Internet
- <https://ppid.boyolali.go.id/new/2019/01/boyolali-boyong-piala-adipura-ke-13-dan-dua-penghargaan-lain/>, diakses pada 21 Januari 2019.
- <http://www.krjogja.com/web/news/read/30961/Boyolali Raih Penghargaan Kabupaten Berkinerja Terbaik>, diakses pada 25 Februari 2018
- <https://indonesiapos.news/6-propinsi-dan-10-kabupaten-dan-kota-di-indonesia-raih-prestasi-kinerja-tertinggi/>, diakses pada 21 Januari 2019
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rosa-fofia/dianggap-hoax-ini-pembelaan-bupati-boyolali-soal-disneyland/full>, diakses pada 21 Januari 2019
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170418065559-185-208254/netizen-kecewa-disneyland-boyolali-hoax>, diakses 21 Januari 2019
- <https://www.jawapos.com/read/2017/10/30/165482/tuntutan-konsumen-di-era-digita>

## Undang-undang

UUD 1945 Pasal 28 huruf f *tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *tentang keterbukaan informasi publik (kip)*

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2015 *tentang pengelolaan komunikasi publik, dimana diseminasi diarahkan harus secara cepat, tepat, efektif, berwawasan nasional, dan lintas daerah*

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2005 *tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian negara republik indonesia.*

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2016 *uraian tugas jabatan eselon pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten boyolali*

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Strategi Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dalam  
Pengelolaan Informasi Publik

Nama : Finnas Fauzia Trisani

NIM : 14419144018



Yogyakarta, 24 Januari 2019

Mengetahui,  
Reviewer

Dra. Pratiwi Wahyu Widiarti, M.Si  
NIP. 19590723 198803 2 001

Dosen pembimbing

Dr. Suranto, M. Pd., M. Si.  
NIP. 19610306 198702 1 004

